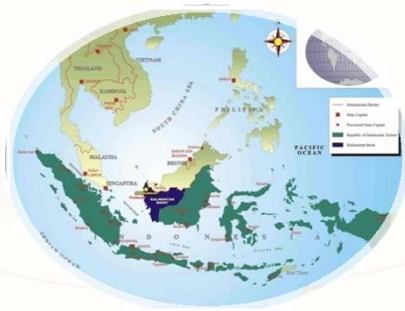




IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

IKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN SEKTOR PUBLIK

UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK



OLEH :

ISKANDAR NOVIANTO, AK., MSI., CFRA., CA., QIA., CIPSAS
WAKIL KETUA IAI KASP 2016 – 2018

CROWN HOTEL, SEMARANG, 15 DESEMBER 2017



Curriculum Vitae

Nama : Iskandar Novianto, Ak.,M.Si., CFA., CA., QIA., CIPSAS
HP/e-mail : 082150662013 / iskandarnovi@yahoo.com
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 20 November 1963
Agama : Islam
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya / IV - D
Jabatan : Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah III, BPKP
Riwayat Pendidikan :

- Ajun Akuntan, lulus tahun 1985 dari STAN, Depkeu, Jakarta
- Akuntan, lulus tahun 1993 dari STAN, Depkeu, Jakarta
- Magister Administrasi Publik (MAP), Univ Gadjah Mada lulus tahun 2005

Overseas Study/ Course:

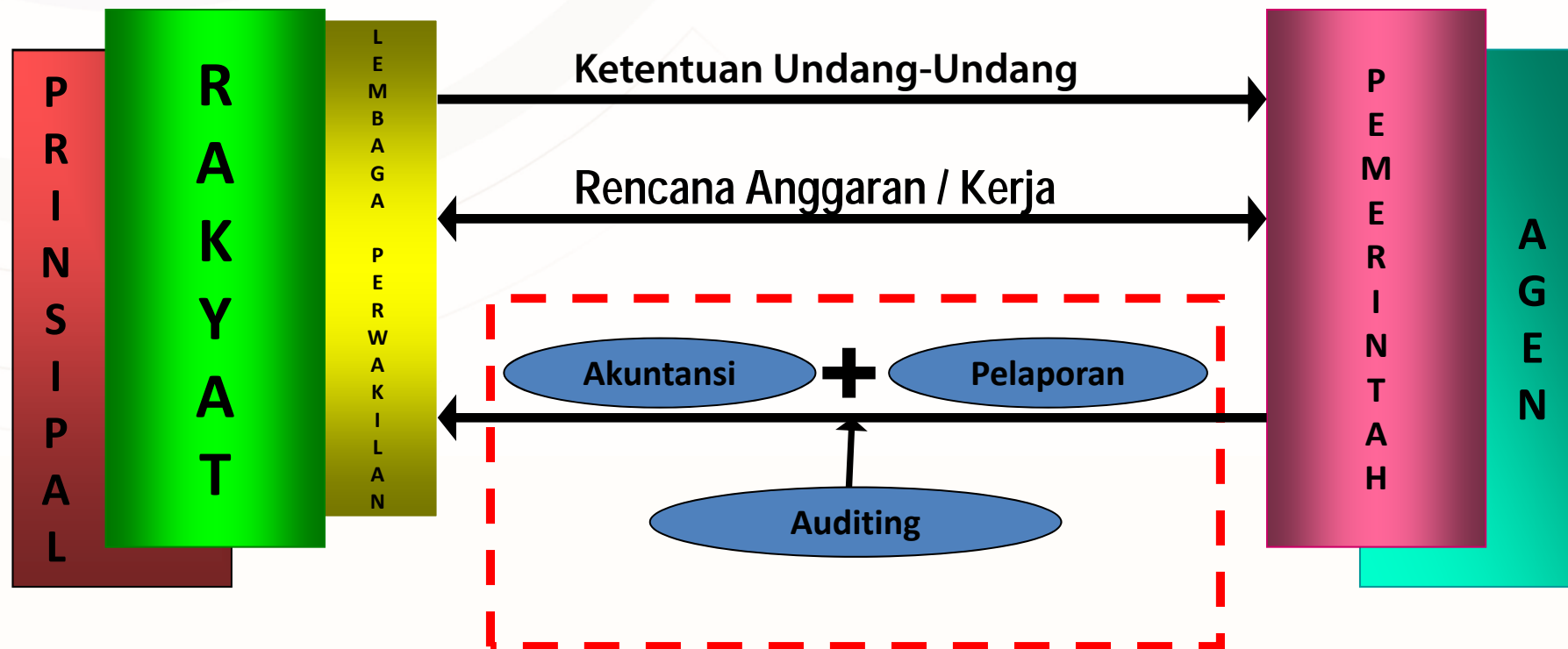
- South South Knowledge Exchange Program on Village Governance and Economic Development, Kolkata, Chennai, New Delhi, India, Januari – Februari 2017
- International Study And Benchmark Course, Implementation of Accrual bases Accounting in Public Sector, Massey University, New Zealand, October 2013
- Training Workshop Developing Performance Measurements in the Public Sector, PTS, Ottawa, Canada, July 2010

Riwayat Jabatan :

1. Kepala Seksi, tahun 1998 – 2002 di Perw. BPKP Kalimantan Selatan
2. Pengendali Teknis, tahun 2003 – 2005 di Perw. BPKP DIY
3. Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP 2005-2012
4. Kasubdit Pengawasan Pertahanan dan Keamanan, BPKP Maret 2012- Sept 2012
5. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Tengah, Sept 2012 s.d Juni 2015
6. Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah III, BPKP, Juni 2015 s.d sekarang.

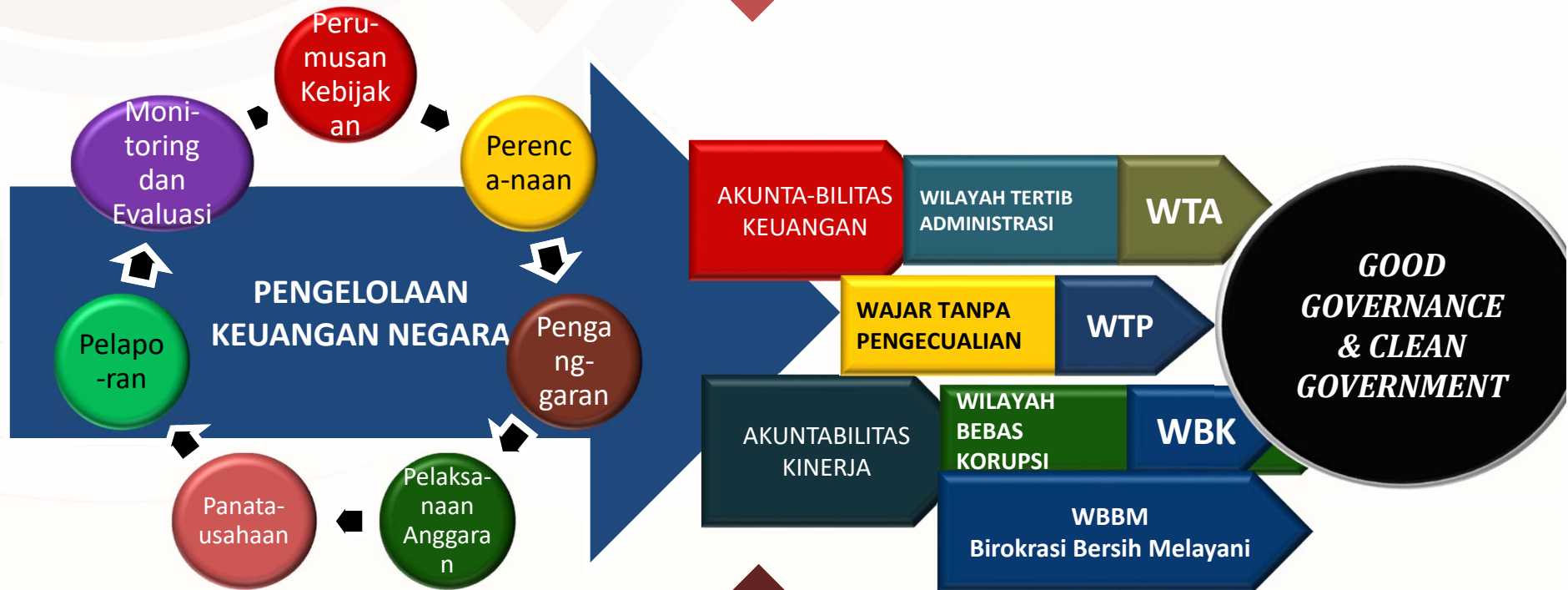


HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL-AGEN: SOLUSI



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada **Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara**

tupimpran27april2012@hw



Peran Aparat Pengawasan Internal yang **Optimal (Consulting & Assurance)**



Dasar Penyusunan LKPD

UU Keuangan Negara

PP 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tujuan Akuntansi Berbasis Akrua

- Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan
- Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
- Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
- Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan
- Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik
- Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik
- Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset

RPJMN 2015 – 2019

KEBIJAKAN NASIONAL	KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA	INDIKATOR	SASARAN 2019
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara	Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan SAP (PP 71/2010)	% Opini WTP K/L	95 %
		% Opini WTP Provinsi	85 %
	Penggunaan SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi	% Opini WTP Kabupaten	60 %
		% Opini WTP Kota	65 %

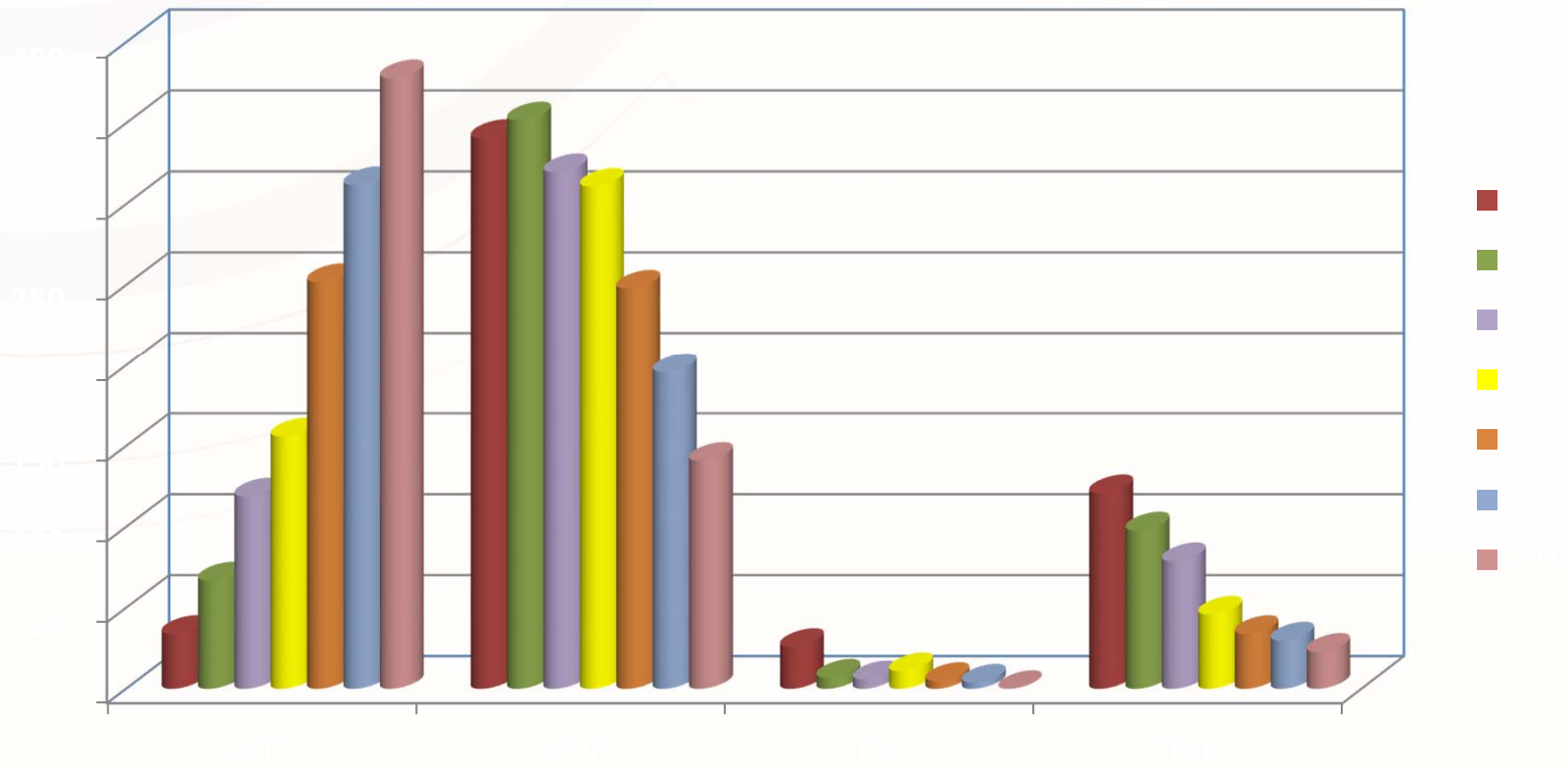
Mulai LKPD Tahun 2015, Pemda menggunakan basis akuntansi akrual penuh sesuai PP No. 71 Tahun 2010

Perkembangan Opini LKPD

LKPD	OPINI								JML
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121	23%	524
2011	67	13%	349	67%	8	1%	100	19%	524
2012	119	23%	320	61%	6	1%	79	15%	524
2013	156	30%	311	59%	11	2%	46	9%	524
2014	252	47%	248	46%	5	1%	34	6%	539
2015	312	58%	196	36%	4	1%	30	6%	542
2016	378	70%	141	26%	0	0%	23	4%	542

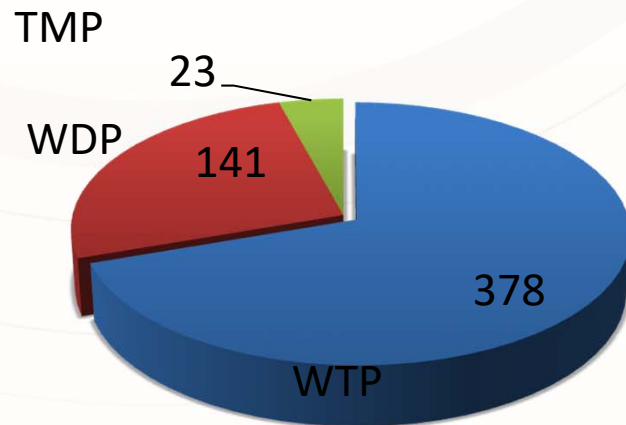
Mulai LKPD Tahun 2015, Pemda menggunakan basis akuntansi akrual penuh sesuai PP No. 71 Tahun 2010

Perkembangan Opini LKPD

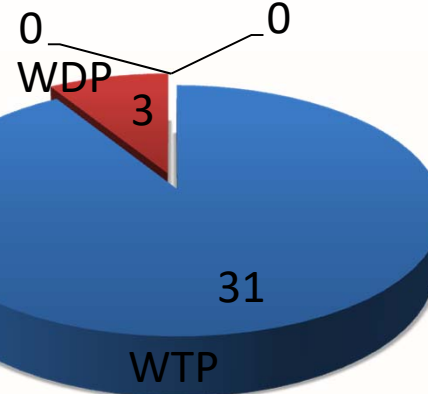


Opini atas LKPD 2016

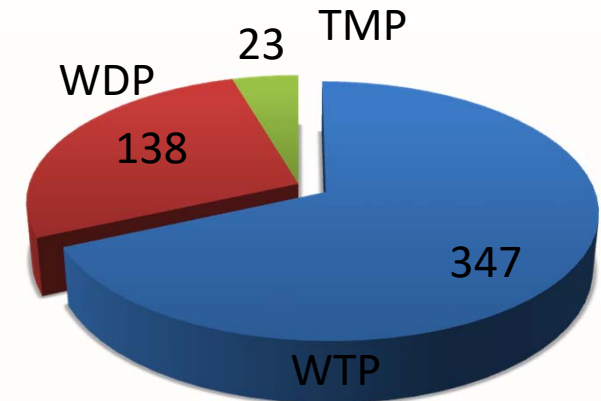
Opini LKPD Keseluruhan



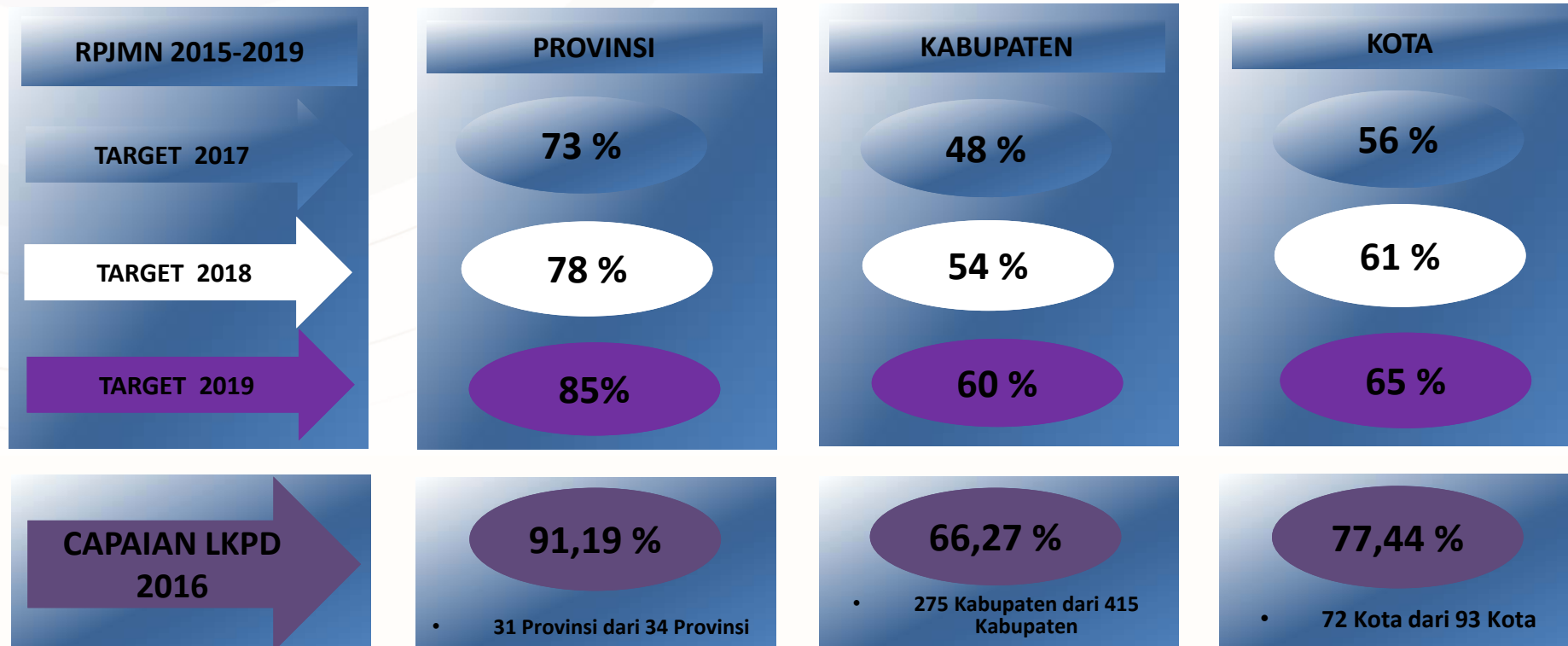
Provinsi



Kab/Kota

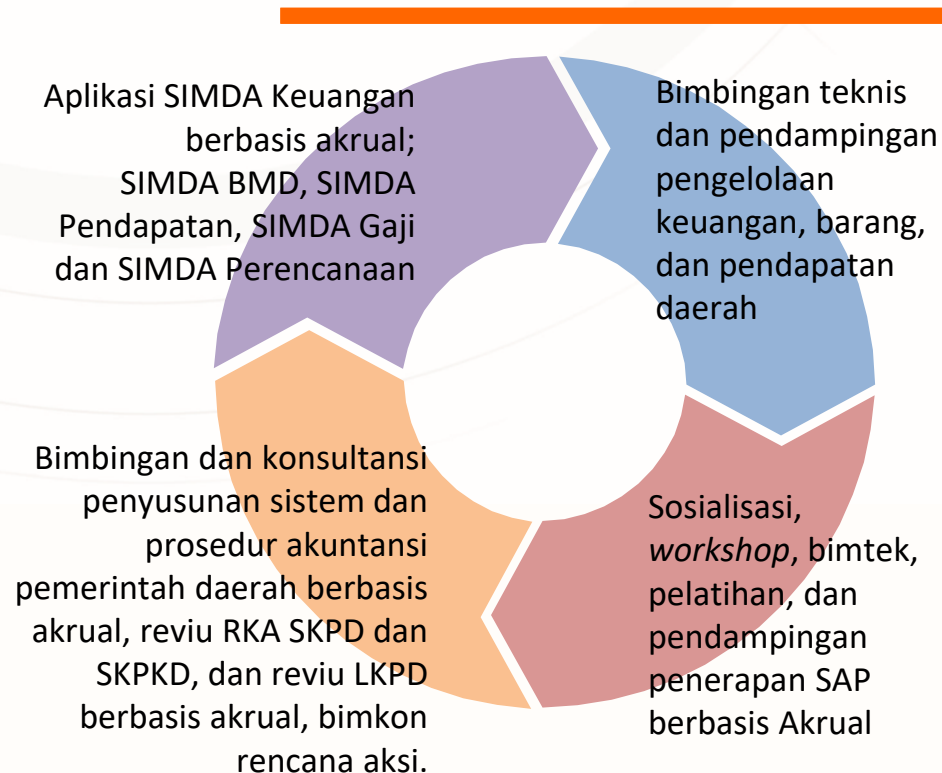


CAPAIAN TARGET OPINI WTP ATAS LKPD RPJMN 2015 - 2019



PENINGKATAN GOVERNANCE SYSTEM

Akuntabilitas Pemerintah Daerah



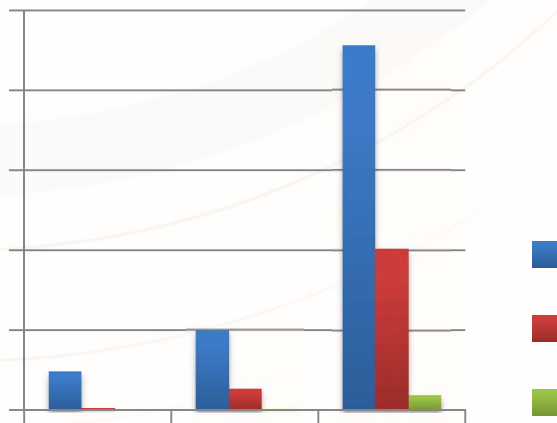
Peningkatan Level Maturitas SPIP, Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Keuangan dan APIP Daerah

Meningkatkan implementasi sistem e-planning e-musrenbang, e-ASB dan e-budgeting menggunakan SIMDA Perencanaan serta LPSE pada Pemda

Capaian Opini WTP 2016 Atas Target 2019

	Prov	Kab	Kota
Target RPJMN 2019	85%	60%	65%
Opini WTP LKPD 2016	31/29 91,19%	275/250 66,27%	72/61 77,44%

Implementasi SIMDA



80% Dari total 542 Pemda yang ada,
432 Pemda
Mengimplementasikan SIMDA

70% 302 Pemda dari 432 Pemda
yang Mengimplementasikan
SIMDA, Memperoleh Opini
WTP

Data Per 30 November 2017

Permasalahan yang Mempengaruhi Opini LKPD

- Lemahnya SPI di Pemerintah Daerah
- Rendahnya Kapabilitas APIP di Pemerintah Daerah
- Kapasitas fiskal & Alokasi Anggaran belum optimal
- Keterbatasan SDM, penyebaran tidak merata

HASIL ANALISIS LKPD 2016

398 dari 469 pemkab/kota memiliki rasio tingkat kemandirian keuangan daerah di bawah 20%.

Low Fiscal Capacity

Budget Allocation

74 pemda mengalami peningkatan PAD dan Belanja Pegawai, namun tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal.

67 pemda mengalami penurunan rasio kemandirian keuangan dan PAD, namun Belanja Pegawainya meningkat.

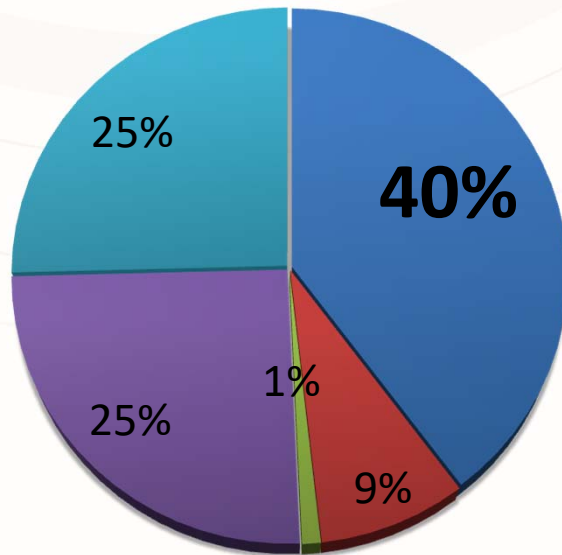
35 pemda mengalami penurunan PAD dan Belanja Modal, namun mengalami peningkatan pada Belanja Pegawai.

RASIO KEMANDIRIAN



<http://bit.ly/2uqDAOG>

PROPORSI APBD PEMDA T.A. 2016 (AGREGAT)



Belanja Pemda

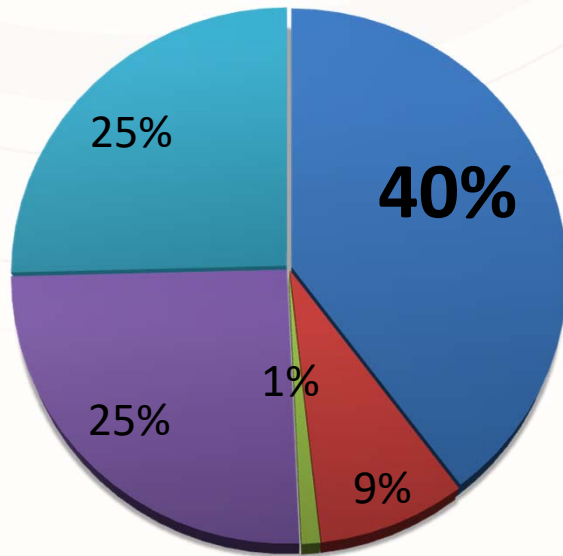
69,5% Proporsi Belanja
Pegawai Tertinggi

→ Kabupaten Klaten

9,8% Proporsi Belanja
Pegawai Terendah

→ Kab. Manokwari Selatan

PROPORSI APBD PEMDA T.A. 2016 (AGREGAT)



Belanja Pemda

69,5% Proporsi Belanja Pegawai Tertinggi

➔ Kabupaten Klaten

9,8% Proporsi Belanja Pegawai Terendah

➔ Kab. Manokwari Selatan

OPINI LKPD TAHUN 2015 – 2016

NO	OPINI	2016	2015
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	378	312
2	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	141	196
3	Tidak Wajar (TW)	-	4
4	Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	23	30
	JUMLAH	542	542

PERUBAHAN OPINI LKPD TAHUN 2015 - 2016

NO	OPINI	JUMLAH	%
1	Opini Tetap WTP	292	53.87%
2	Opini Tetap WDP	106	19.56%
3	Opini Naik WDP ke WTP	84	15.50%
4	Opini Turun WTP ke WDP	20	3.69%
5	Opini Turun WDP ke TMP	6	1.11%
6	Opini Tetap TMP	16	2.95%
7	Opini TMP ke WDP	13	2.40%
8	Opini Naik TMP ke WTP	1	0.18%
9	Opini TW ke TMP	1	0.18%
10	Opini Naik TW ke WTP	1	0.18%
11	Opini Naik TW ke WDP	2	0.37%
JUMLAH		542	100 %

**PENYEBAB
OPINI LKPD
2016 YG
WDP /
TMP**

No	Penyebab	Jumlah Temuan	%
1	Pencatatan / Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai	146	21.07
2	Pelaksanaan Pekerjaan Belum/Tidak sesuai ketentuan	91	13.13
3	Penyajian Laporan Belum Sesuai SAP	80	11.54
4	Pelaksanaan Belanja Belum Memadai	62	8.95
5	Pengelolaan Kas Belum Memadai	49	7.07
6	Pengelolaan Dana BOS Belum Memadai	47	6.78
7	Penyajian Aset Lainnya dan Investasi Belum Memadai	45	6.49
8	Penatausahaan Piutang Belum Memadai	32	4.62
9	Penatausahaan Persediaan Belum Memadai	30	4.33
10	Pengelolaan PAD Belum Memadai	29	4.18
11	Pengelolaan Dana Bantuan Belum Memadai	8	1.15
12	Temuan Hasil Pemeriksaan Belum Ditindaklanjuti	6	0.87
13	Penatausahaan Pajak Pusat Belum Memadai	6	0.87
14	Pengelolaan BLUD Belum Memadai	2	0.29
15	Lain-lain	60	8.66
Jumlah		693	100

Penyebab Pencatatan / Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai

No	Uraian	Jumlah	%
1	Pencatatan penyajian AT salah/tdk sesuai SAP	70	47.95
2	Pengelolaan bmd tdk memadai	40	27.40
3	Keberadaan fisik tidak diketahui	16	10.96
4	Belum dilakukan inventarisasi	11	7.53
5	Aset tdk didukung dokumen memadai	3	2.05
6	Penyerahan P2D blm dilaksanakan	3	2.05
7	Kesalahan penganggaran	1	0.68
8	Perhitungan dan penyajian penyusutan	1	0.68
9	Kebijakan ttg aset tetap blm dibuat	1	0.68
	Jumlah	146	100

Penyebab Pelaksanaan Pekerjaan Belum/Tidak sesuai ketentuan

No	Uraian	Jumlah	%
1	Kelebihan pembayaran / kekurangan volume	64	70.33
2	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Perjanjian	15	16.48
3	Kemahalan harga	8	8.79
4	Pengadaan tidak sesuai ketentuan	4	4.40
Jumlah		91	100

Penyebab Penyajian Laporan Belum Sesuai SAP

No	Uraian	Jumlah	%
1	Penyajian akun tidak dapat diyakini kewajarannya	40	50.00
2	Penyajian akun tidak sesuai SAP	31	38.75
3	Laporan tidak berdasarkan sistem akuntansi	6	7.50
4	Permasalahan saldo awal	3	3.75
	Jumlah	80	100

Penyebab Pelaksanaan Belanja Belum Memadai

No	Uraian	Jumlah	%
1	Belanja tdk sesuai ketentuan	39	62.90
2	Belanja tdk didukung bukti	23	37.10
	Jumlah	62	100

Penyebab Lain-lain

No	Uraian	Jumlah	%
1	BPK tidak dapat melakukan prosedur yg memadai	1	2
2	Perencanaan Tidak Sesuai Ketentuan	1	2
3	Jaminan tidak dapat dicairkan	2	3
4	indikasi fraud/korupsi	9	15
5	SPI tidak memadai	9	15
6	kesalahan penganggaran	19	32
7	Penatausahaan keuangan belum memadai	13	22
8	ketidak sesuaian dg aturan	6	10
JUMLAH		60	100

SOLUSI :

- Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Peningkatan Kapabilitas SDM Pengelola Keuangan dan APIP
- Penganggaran Berbasis Kinerja dan Berorientasi Outcome

SUMBERDAYA

EKONOMI

EFFEKTIVITAS

input

proses

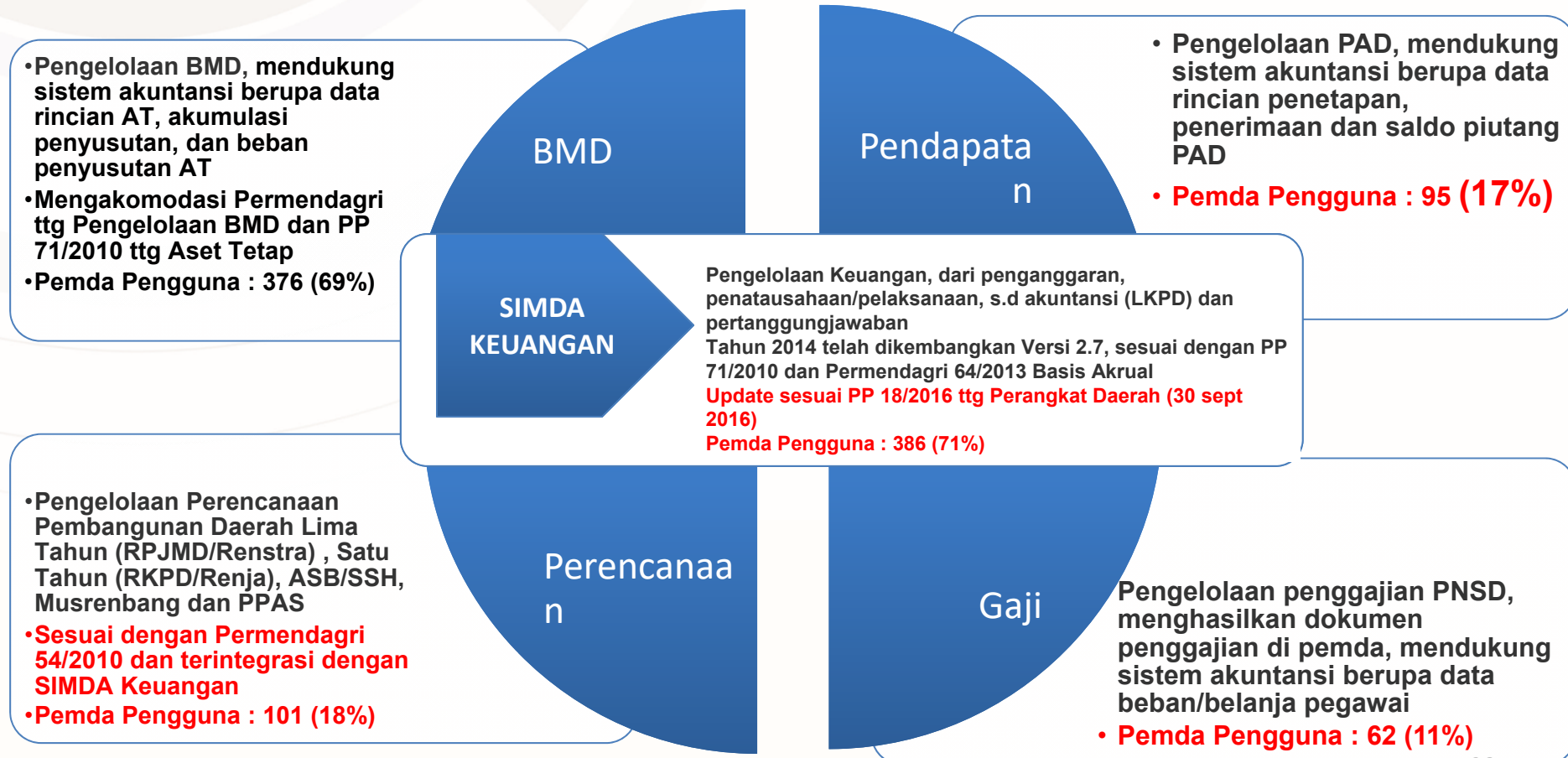
output

outcome

EFFISIENSI

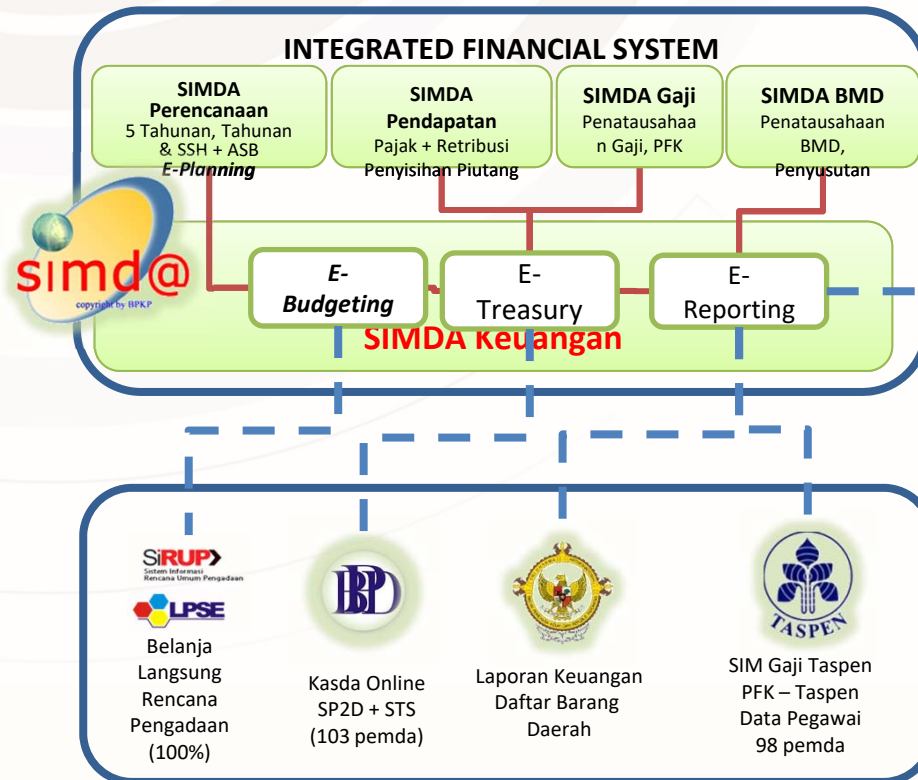
Solusi :

Penerapan E-Planning, E-Budgeting, E-Procurement, E-Reporting (Aplikasi SIMDA per 30/11-17)



Jumlah Implementasi Nasional:

- SIMDA Keuangan 386 dari 542 Pemda (71,22%)



Jumlah Implementasi Nasional:

- 57.435 dari 74.954 Desa (76,63%)
- 372 dari 434 Kab/Kota (85,71%)



detiknews

Senin 11 Desember 2017, 21:35 WIB

Dorong WTP, Sandiaga akan Hukum SKPD yang Tak Catat Detail Aset

Muhammad Fida UI Haq - detikNews



Wagub DKI Sandiaga Uno (Marlinda Oktavia
Erwanti/detikcom)

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terus berkoordinasi dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Sandiaga menegaskan akan memberi sanksi kepada SKPD yang tidak melakukan pencatatan aset dengan baik.

"Setiap rapat WTP itu didampingi Pak Sekda

TERIMA
KASIH

Terima
Kasih

terima
kasih